

ANALISIS BIAYA PENDIDIKAN PADA SMP CIPTA DHARMA DENPASAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Ni Luh Susilawati, Made Yudana, Nyoman Natajaya

Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {luh.susilawati, made.yudana, nyoman.natajaya}@pasca.undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya pendidikan pada SMP Cipta Dharma Denpasar tahun pelajaran 2012/2013. Populasi dan subjek penelitian ini berjumlah 426 orang. Data dikumpulkan dengan observasi dan analisis terhadap RAPBS serta kuaseioner sebagai instrumen penunjang. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil analisis ditemukan: (1) komposisi biaya pendidikan tahun 2012/2013 adalah: uang pangkal siswa baru Rp 515.500.000 (28,820%), uang sekolah dan uang komputer kelas 9 sebesar Rp 474.000.000 (26,500%), uang sekolah dan uang komputer kelas 8 sebesar Rp 343.800.000 (19,221%), uang sekolah dan uang komputer kelas 7 sebesar Rp 443.400.000 (24,789%), dan kontribusi kantin Rp 12.000.000 (0,671%) dengan jumlah total keseluruhan Rp 1.788.700.000 (2) total biaya (*total cost*) yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan Rp 1.788.700.000. Pembiayaannya antara lain kegiatan belajar mengajar Rp 305.000.000, sarana pendidikan Rp 141.000.000, peningkatan mutu guru/murid Rp 93.500.000, pemeliharaan sekolah Rp 88.000.000, imbal jasa Rp 979.000.000, dan biaya lain-lain 182.200.000, (3) unit cost per siswa dan satuan biaya pendidikan di sekolah SMP Cipta Dharma Denpasar tahun pelajaran 2012/2013 sebesar Rp 9.151.410,066, dan (4) terjadi peningkatan mutu pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar yang dibebankan oleh peningkatan pembiayaan dari tahun ke tahun.

Kata kunci: analisis biaya pendidikan, *total cost*, *unit cost*, mutu pendidikan

Abstract

The aim of this research to determine the cost of education at the junior Copyright Dharma Denpasar school year 2012/2013. The population and the samples were 426 people. The data were collected through the School Budget, and the questionnaire as a supporting instrument. Data were analyzed descriptively. The results of the analysis found: (1) the composition of the cost of education in 2012/2013 are: a new student tuition Rp 515,500,000 (28.820%), tuition and class 9 from computer division is Rp 474,000,000 (26.500%), school fees and class 8 from computer division is Rp 343,800,000 (19.221 %), tuition and class 7 from computer division is Rp 443,400,000 (24.789 %), and the contribution of the cafeteria Rp 12,000,000 (0.671 %) (2) total costs required to finance the provision of education Rp 1,788,700,000. (3) the unit cost for each student in SMP Cipta Dharma Denpasar amounted to Rp 9,151,410.066, and it have seen that increasing quality of education at the SMP Cipta Dharma Denpasar be caused by increasing in funding from year to year.

Keywords : analysis of education costs, the total cost, unit cost, the quality of education

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat memberikan sumbangan nyata terhadap kemajuan pembangunan suatu bangsa. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia agar siap menghadapi segala macam tantangan dalam persaingan global. Untuk itu peningkatan mutu pendidikan mutlak diperlukan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih produktif, kreatif dan inovatif dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan lebih cepat. Pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan seseorang di kemudian hari, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, negara dan bangsa.

Suprpto (2007:231-220), "Refleksi Sistem Pendidikan Nasional" dalam Teropong Pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan merupakan *inherent* dalam kehidupan manusia yang dapat menentukan masa depan generasi muda. Suatu bangsa yang mampu menyelenggarakan sistem pendidikan dengan tepat dan memiliki pandangan jauh ke depan, diperkirakan akan menjadi bangsa yang besar dan unggul di kemudian hari. Oleh karena itu seluruh daya dan upaya bangsa harus ditumpahkan untuk memikirkan dan menyelenggarakan pendidikan yang tepat, prima, optimal, dalam menyambut abad ke XXI sehingga bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang *bigger, higger, and better*.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah. Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 menetapkan tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 2

menyebutkan bahwa pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional ke dalam Sekolah Kategori Mandiri.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, merupakan ujung tombak dan paling menentukan dalam menciptakan suatu generasi yang mampu menghadapi tantangan global yang terjadi saat ini. Beberapa indikator yang esensial yang sangat menentukan mutu sekolah sebagai *input* antara lain siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Menurut Aan Komariah (2006:2), bahwa input sekolah dapat diidentifikasi mulai dari manusia (*man*), uang (*money*), material/ bahan-bahan (*materials*), metode (*methods*) dan mesin-mesin (*machines*).

Bagi suatu unit pendidikan atau sekolah biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan atau instrumen *input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Bahkan menurut Supriadi (2004:3), hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.

Pusat penelitian Kebijakan Depdiknas (dalam Walter W.McMahon dan Nanik Suwarni, (2001:19) mengatakan sumber dana per siswa pada tingkat sekolah sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah keberadaan data yang akurat tentang pembiayaan per siswa pada tingkat sekolah, pada tingkat daerah, dan sumber pembiayaan yang ada saat ini. Keberadaan data ini merupakan dasar untuk menganalisis efisiensi sumber-sumber dana, guna memperbaiki proses belajar, dan hasil akhirnya, pemerataan pendidikan diantara siswa, dan

bagaimana cara meningkatkannya, mendisain jenjang sekolah yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan yang memadai bagi setiap anak dan adanya transparansi bagi setiap tingkatan. Semua ini merupakan elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Salah satu masalah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah beragamnya mutu pendidikan di setiap tingkat dan jenis unit pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Pemerintah memprogramkan pada tahun 2013 semua sekolah di Indonesia telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau sekolah disebut sebagai Sekolah Kategori Mandiri.

Untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang kemudian mengalami perubahan menjadi PP No. 32 Tahun 2013, khusus tentang standar pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali merespon dengan menetapkan surat edaran Nomor 421.3/1037/Dispendik tentang Standar Biaya dan Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Bali, yang merumuskan beberapa pedoman untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Bali yang terdiri dari; (1) Pedoman Penerimaan Siswa baru, (2) Pedoman Penyelenggaraan Masa Orientasi Siswa (MOS), (3) Ketentuan Pakaian Seragam Sekolah, (4) Pedoman Sarana/ Prasarana Pendidikan, (5) Pedoman Komite Sekolah, (6) Pedoman Perpindahan Siswa, (7) Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan (8) Pedoman Penetapan RAPBS menjadi APBS.

Untuk memperjelas pembiayaan pendidikan di Indonesia pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam bidang pendidikan.

Lembaga pendidikan termasuk satuan pendidikan merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan sekaligus bertindak sebagai badan penyelenggara yang menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Selain memberi pelayanan pendidikan, lembaga pendidikan juga mengemban tugas sosial, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan.

Menurut Fattah (2000:26), satuan biaya dapat pula dianalisis berdasarkan unit analisis lembaga pendidikan. Dengan cara ini faktor-faktor yang ikut

berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan dapat diungkap secara rinci. Satuan biaya per lembaga pendidikan diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh biaya yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sama halnya dengan perhitungan satuan biaya per siswa, sumber-sumber biaya yang dapat dimanfaatkan dalam analisis satuan biaya per lembaga dapat dihitung berdasarkan subsidi pemerintah, orangtua siswa, masyarakat dan kontribusi lainnya. Penerapan biaya satuan atau *unit cost* di sekolah sangat diperlukan agar dapat memberikan gambaran bagi penyelenggara pendidikan swasta dalam menghitung penetapan biaya penyelenggaraan pendidikan yang sudah barang tentu akan berbeda dengan sekolah lain yang lain walaupun penyelenggaraan pendidikan yang sama. Sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengelola pendidikan dalam menetapkan biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa.

Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan serta implementasi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, maka studi mengenai perhitungan satuan biaya pendidikan merupakan hal yang pokok bagi satuan pendidikan khususnya SMP Cipta Dharma Denpasar. Apalagi Peraturan Pemerintah No.19 /2005 pasal 62, yang menegaskan bahwa standar pembiayaan akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pemerintah Daerah Bali menetapkan surat edaran tentang Standar Biaya dan Penyelenggaraan Pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/ kota di provinsi Bali yang belum dilaksanakan seratus persen dengan berbagai alasan. Hal ini makin menjadi hal mendesak dan bersifat strategis, karena adanya tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan yang berimplikasi pada kenaikan biaya pendidikan.

Pemerintah dan masyarakat semakin besar memperhatikan biaya pendidikan, karena tersedianya biaya

pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Bahkan biaya pendidikan itu meningkat dari waktu ke waktu, bukan semata-mata karena faktor inflasi, tetapi karena tuntutan kemajuan teknologi pembelajaran, sarana, fasilitas pembelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan merupakan sektor intensif dalam pengembangan tenaga manusia, bahkan tenaga yang profesional yang dengan sendirinya memerlukan biaya. Oleh karena itu perlu ada studi yang mendalam tentang satuan biaya pendidikan agar dapat menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas. Hal ini merupakan prinsip universal dalam peningkatan mutu pendidikan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas mendasari peneliti untuk meneliti tentang " Analisis Biaya Pendidikan pada SMP Cipta Dharma Tahun Pelajaran 2012/2013"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian *ex-post facto*, karena gejala yang diselidiki ada secara wajar dan tidak dimanipulasi. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa, guru sebagai tenaga pendidik (edukatif), serta tenaga kependidikan lain di SMP Cipta Dharma Denpasar pelajaran 2012/2013. Karena perhitungan analisis biaya menggunakan semua populasi, maka semua populasi dipakai sebagai subjek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisis biaya dan analisis korelasi untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antara standar biaya pendidikan dengan mutu pembelajaran guru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber pendapatan pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar berasal dari masyarakat dan sumber lainnya berupa kontribusi dari kantin sekolah. Sumber dana yang diperoleh SMP Cipta Dharma Denpasar digunakan untuk:

biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, gaji dan tunjangan lainnya. Dana untuk gaji beserta tunjangannya besarnya pasti dan bersumber dari dana masyarakat.

Seperti yang dideskripsikan bahwa sumber biaya yang terbesar di SMP Cipta Dharma Denpasar berasal dari uang pangkal siswa sebesar 27,032% untuk tahun 2010/2011, dan 28,820% tahun 2012/2013 sedangkan pada tahun 2011/2012 yang paling besar bersumber dari uang sekolah dan uang komputer Kelas 8 sebesar 28,111%. Dilihat dari pengeluaran, tampak bahwa pengangggaran paling besar pada imbal jasa (termasuk gaji) sebesar 55,529% tahun 2010/2011, 59,155% tahun 2011/2012, dan 54,732% tahun 2012/2013. Dari data tersebut tampak bahwa pada tahun pelajaran 2011/2012 terjadi penurunan presentase pengeluaran dari imbal jasa, karena terjadi penurunan jumlah pesonel di SMP Cipta Dharma Denpasar.

Kenyataan ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 menyebutkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, yang selanjutnya juga disebutkan sumber pendanaan pendidikan terdiri dari (1) pemerintah, (2) pemerintah daerah, dan (3) masyarakat. Namun di SMP Cipta Dharma Denpasar sumber pembiayaan berasal dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud meliputi: 1). penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 2) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan 3) pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dalam pasal 3 biaya pendidikan meliputi (a) biaya satuan pendidikan, (b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan (c) biaya pribadi peserta didik. Berbagai literatur menyebutkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan diketahui dari (1)

dana pemerintah, (2) dana non pemerintah, dan (3) sumbangan sosial, swasta, perusahaan serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya dan dana dari keluarga siswa. Dana masyarakat pada umumnya dihitung dari jumlah alokasi dana yang ditanamkan untuk pembiayaan pendidikan. Dana sumbangan dihitung berdasarkan jumlah sumbangan yang disertakan untuk pembiayaan pendidikan. Sedangkan dana keluarga yang dihitung menurut besarnya pengeluaran untuk keperluan pendidikan. Jadi sumb biaya pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar tahun 2012/2013 adalah: uang pangkal siswa baru Rp 515.500.000 (28,820%), uang sekolah dan uang komputer kelas 9 sebesar Rp 474.000.000 (26,500%), uang sekolah dan uang komputer kelas 8 sebesar Rp 343.800.000 (19,221%), uang sekolah dan uang komputer kelas 7 sebesar Rp 443.400.000 (24,789%), dan kontribusi kantin Rp 12.000.000 (0,671%) dengan jumlah total keseluruhan Rp 1.788.700.000 pada tahun 2012/2013.

Biaya satuan pendidikan SMP Cipta Dharma Denpasar meliputi total biaya operasional personal, biaya operasional non personal, bantuan dan beasiswa. Besarnya penggunaan dana untuk satuan biaya pendidikan SMP Cipta Dharma Denpasar tahun pelajaran 2010/2011 dengan jumlah satuan biaya sekolah *total cost* Rp. 1.594.400.000, tahun 2011/2012 Rp 1.581.600.000, dan tahun 2012/13 sebesar Rp 1.788.700.000. Bila dilihat dari sumber pendaan dari masyarakat juga sama dengan pengeluaran yakni Rp. 1.594.400.000, tahun 2011/2012 Rp 1.581.600.000, dan tahun 2012/13 sebesar Rp 1.788.700.000. Dengan demikian total total biaya (*total cost*) yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar yang bersumber dari masyarakat pada tahun 2012/2013 Rp 1.788.700.000. Pembiayaannya antara lain kegiatan belajar mengajar Rp 305.000.000, sarana pendidikan Rp 141.000.000., peningkatan mutu

guru/murid Rp 93.500.000, pemeliharaan sekolah Rp 88.000.000, imbal jasa Rp 979.000.000, dan biaya lain-lain 182.200.000.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: (1) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; dan (2) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya (Depdiknas, 2007).

Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni: (1) keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, (2) keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik, (3) keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan, dan (4) keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah.

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya pribadi ini juga disebut biaya tak langsung meliputi biaya buku tulis, biaya transport ke sekolah, biaya pakaian seragam, biaya jajan dan lainnya.

Seperti telah dideskripsikan bahwa biaya pribadi siswa SMP Cipta Dharma Denpasar diperuntukkan biaya pribadi langsung pembelajaran 23,64% (biaya les diluar sekolah 14,52 %, biaya buku/LKS 5,59% dan alat tulis 3,53%), biaya pribadi tak langsung pembelajaran 16,90% (tas sekolah 2,58%, Sepatu 2,71%, pakaian seragam sekolah 4,07%, pakaian olah raga dan ekstra 2,29% serta biaya karya wisata 5,25%). Biaya pribadi pendukung kelancaran pembelajaran 59,46% (untuk biaya jajan sebesar 37,46%, selanjutnya biaya transportasi sebesar 21,41% dan sumbangan insidetil 0,59%). Jadi biaya pribadi siswa terbesar pada biaya pribadi pendukung pembelajaran, kedua biaya pribadi langsung pembelajaran, dan yang ke tiga biaya pribadi tak langsung pembelajaran. Jadi perbandingan Satuan biaya pendidikan per siswa dengan biaya pribadi dalam tahun 2012/2013 sebesar Rp 4.719.525,066 sedangkan biaya pribadi persiswa Rp. 4.431.885, sehingga *unit cost* per siswa dan satuan biaya pendidikan di sekolah SMP Cipta Dharma Denpasar tahun pelajaran 2012/2013 sebesar Rp 9.151.410,00 pertahun secara keseluruhan.

Perhitungan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Ghazali (2004), bahwa satuan biaya pendidikan untuk investasi atau modal adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang dimanfaatkan dalam waktu lebih dari satu tahun per siswa per tahun. Secara garis besar biaya modal meliputi unsur-unsur; (1) biaya tanah, (2) biaya taman, (3) biaya fasilitas olahraga, (4) biaya bangunan, (5) biaya peralatan dan perlengkapan, (6) biaya perabot dan *mebeler*, (7) biaya buku teks, buku sumber dan bacaan, serta (8) biaya jaringan listrik, telepon, air dan gas.

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah memang merupakan unsur biaya investasi, tetapi harga tanah tidak diperhitungkan dalam biaya pendidikan, karena tanah dianggap tidak mengalami penyusutan. Tetapi kalau menyewa tanah, maka sewanya tiap tahun diperhitungkan sebagai biaya pendidikan. Sementara untuk biaya bangunan, taman, fasilitas olahraga, peralatan dan perlengkapan, perabot dan mebel, serta buku teks, buku sumber bacaan, dihitung nilai taksiran penyusutannya tiap tahun sebagai komponen investasi selain lahan.

Biaya rutin atau biaya operasional, dapat juga dibedakan menurut objek pengeluaran, menjadi belanja pegawai atau biaya personalia dan belanja barang serta bahan atau biaya non personalia. Biaya pegawai mencakup gaji guru, gaji pegawai administrasi dan staf lainnya. Dalam pengertian gaji ini sudah termasuk semua jenis tunjangan, tunjangan jabatan struktural (kepala sekolah, wakasek, wali kelas, Pembina yang lainnya) dan jabatan fungsional ditambah dengan insentif (kesejahteraan), honorarium kelebihan mengajar, tunjangan hari raya, dan lain sebagainya. Dalam belanja pegawai ini dimasukkan juga biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan staf, khususnya peningkatan profesionalisme guru. Biasanya komponen terpenting dan dominan dari belanja pegawai adalah gaji guru (imbal jasa). Hampir sama dengan pendapat di atas, menyebutkan belanja pegawai ini sebagai biaya kesejahteraan personal, yaitu biaya yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk keperluan kesejahteraan personal dalam setahun, yang meliputi gaji/ honor, tunjangan, kesra, transportasi, seragam, kelebihan jam mengajar, tunjangan hari raya dan dana sosial. Belanja barang dan bahan meliputi pengeluaran untuk pembelian alat-alat tulis, baik untuk menunjang proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar (ulangan harian, tengah semester dan ujian akhir), maupun untuk keperluan kantor. Bahan-bahan untuk praktikum dan laboratorium

serta bahan habis untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar, daya listrik dan jasa, pemeliharaan dan perawatan untuk bangunan, alat, perlengkapan dan inventaris.

Pendapat Ghazali, *et al* (2004), boleh dikatakan hampir sama dengan PP 48/2008 yang dipaparkan di atas, dengan menggunakan istilah biaya operasional non personel, yang meliputi; (1) biaya alat tulis sekolah, (2) biaya daya dan jasa, (3) biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan, (4) biaya pembinaan siswa, dan (5) biaya rapat. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka total biaya pendidikan adalah jumlah penyusutan dari investasi selain lahan (aktiva tetap dan tidak tetap atau biaya modal) ditambah dengan biaya operasional (biaya rutin). Dengan demikian biaya pendidikan bukan hanya pengeluaran dalam wujud uang (*monetary expenditure*), tetapi mencakup pula biaya non moneter (*non-monetary expenditure*), yaitu penyusutan benda modal. Hal ini perlu diperhitungkan, karena benda modal ikut berperan dalam proses pendidikan. Untuk biaya pribadi peserta didik merupakan kontribusi keluarga yang dikeluarkan secara individual, maka biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk kepentingannya sendiri, tetapi bukan merupakan penerimaan bagi sekolah, misalnya membeli pakaian seragam, buku, alat-alat tulis, alat pelajaran, biaya transport, les private, biaya telekomunikasi, uang jajan dan lain sebagainya, tidak dimasukkan sebagai biaya pendidikan dalam satuan biaya pendidikan.

Hasil deskripsi menunjukkan bahwa biaya satuan pendidikan SMP Cipta Dharma Denpasar meliputi total biaya operasional personal, biaya operasional non personal, bantuan dan beasiswa. Besarnya penggunaan dana untuk satuan biaya pendidikan SMP Cipta Dharma Denpasar tahun pelajaran 2010/2011 dengan jumlah satuan biaya sekolah *total cost* Rp. 1.594.400.000, tahun 2011/2012 Rp 1.581.600.000, dan tahun 2012/13 sebesar Rp 1.788.700.000. Bila dilihat dari sumber

pendaan dari masyarakat juga sama dengan pengeluaran yakni Rp. 1.594.400.000, tahun 2011/2012 Rp 1.581.600.000, dan tahun 2012/13 sebesar Rp 1.788.700.000. Dari angka-angka tersebut terlihat terjadi peningkatan pembiayaan pendidikan dari tahun ke tahun dengan harapan terjadi peningkatan mutu pendidikan.

Untuk membuktikan dalil bahwa dengan peningkatan biaya juga terjadi peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengetahui adanya kenaikan kualitas mutu pendidikan akan dianalisa penggunaan dana tahun pelajaran 2012/2013. Penggunaan dana untuk investasi meliputi penggunaan dana untuk biaya bangunan gedung dan peralatannya, alat-alat elektronik seperti komputer, mesin dan lainnya yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Penggunaan dana untuk biaya operasi personal meliputi biaya untuk gaji, semua tunjangan dan insentif, jam lebih mengajar dan honorer selama satu tahun pelajaran. Penggunaan dana untuk biaya non personal meliputi semua biaya operasional kegiatan sekolah meliputi biaya alat tulis kantor, biaya penggunaan listrik, telpon, air, biaya pemeliharaan kecil, transportasi, bahan laboratorium, pengadaan bola, atau semua biaya operasional sekolah selain untuk personal. penggunaan dana untuk biaya bantuan meliputi untuk sumbangan kegiatan sosial dan keagamaan, sedangkan penggunaan dana untuk bea siswa meliputi bea siswa prestasi, dan bea siswa miskin.

Setiap penggunaan dana memiliki dampak peningkatan mutu pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar. Penggunaan dana investasi diperkirakan memiliki dampak terbesar akan menaikkan kualitas standar sarana dan prasarana dan standar-standar pendidikan lainnya. Biaya operasi personal memiliki dampak besar pada kualitas standar pendidik dan tenaga kependidikan dan juga standar nasional pendidikan lainnya. Biaya non personal berdampak terhadap standar isi, standar kelulusan, standar pengelolaan,

standar penilaian dan standar lainnya. jadi perubahan salah satu komponen biaya pendidikan akan berdampak pada komponen-komponen lainnya yang digunakan sebagai indikator mutu pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar.

Kalau dilihat dari segi perubahan penggunaan dana dalam satu tahun yaitu penggunaan dana tahun 2010/2011 sebesar Rp 1.594.400.000 meningkat pada tahun 2012/2013 menjadi Rp 1.788.700.000, tetapi ada penurunan tahun 2011/2013 yakni Rp 1.581.600.000. Ini berarti ada kenaikan sebesar Rp. 194.300.000 atau 12,186%. Kalau dibandingkan kenaikan biaya rata-rata per siswa sebesar Rp 4.109.278,351 untuk tahun 2010/2011 dan biaya rata-rata per siswa tahun 2012/2013 Rp. 4.719.525,066 atau naik 14,850%. Dari kenaikan biaya rata-rata per siswa 14,850% ini diharapkan memiliki dampak peningkatan mutu pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar.

Dengan demikian peningkatan biaya pendidikan disertai peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan karena biaya dan kualitas pendidikan mempunyai keterkaitan yang sangat erat, dimana biaya pendidikan yang dikeluarkan akan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran (Fattah, 2000). Diketahui bahwa kualitas pendidikan merupakan fungsi dari sejumlah faktor seperti; *input*, *process*, dan *output*. Biaya pendidikan yang digunakan untuk menyediakan perangkat *input* akan memberikan dampak terhadap kualitas melalui fungsi alokasi yang tepat, adil, dan pendayagunaan biaya secara efektif dan efisien (Bank Dunia, 1995). Biaya merupakan salah satu di antara sejumlah faktor penentu terbentuknya kualitas pendidikan yang berfungsi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.

Oleh karena itu faktor biaya tidak dapat dihindarkan apalagi diabaikan (Rindjin, 2007). Ada kesadaran baru tentang sumber daya manusia sebagai modal insani dan *asset intangibel*. Mereka menyadari bahwa nasib perusahaan bukanlah ditentukan oleh modal finansial, mesin, teknologi dan modal tetap, tetapi sebenarnya ada ditangan modal kapital intangibel yang tidak lain adalah kompetensi sumber daya manusia (H.Achmad S.Ruky, 2006). Hal ini hanya bisa diraih melalui proses pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat menentukan dari pada modal-modal lainnya. Besar kecilnya biaya pendidikan yang diperlukan di tingkat sekolah, berhubungan dengan berbagai indikator kualitas pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, angka ketinggalan kelas, dan prestasi belajar siswa (Triaswati, 2005). Dengan demikian, biaya pendidikan akan menentukan kualitas pendidikan.

PENUTUP

Hasil analisis ditemukan: (1) biaya pendidikan di SMP Cipta Dahrama Denpasar tahun 2012/2013 adalah: uang pangkal siswa baru Rp 515.500.00 (28,820%), uang sekolah dan uang komputer kelas 9 sebesar Rp 474.000.000 (26,500%), uang sekolah dan uang komputer kelas 8 sebesar Rp 343.800.000 (19,221%), uang sekolah dan uang komputer kelas 7 sebesar Rp 443.400.000 (24,789%), dan kontribusi kantin Rp 12.000.000 (0,671%) dengan jumlah total keseluruhan Rp 1.788.700.000 pada tahun 2012/2013, (2) total total biaya (*total cost*) yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar yang bersumber dari masyarakat pada tahun 2012/2013 Rp 1.788.700.000. Pembiayaannya antara lain kegiatan belajar mengajar Rp 305.000.000, sarana pendidikan Rp 141.000.000, peningkatan mutu guru/murid Rp 93.500.000, pemeliharaan

sekolah Rp 88.000.000, imbal jasa Rp 979.000.000, dan biaya lain-lain 182.200.000, (3) perbandingan satuan biaya pendidikan per siswa dengan biaya pribadi dalam tahun 2012/2013 sebesar Rp 4.719.525,066 sedangkan biaya pribadi persiswa Rp. 4.431.885, sehingga *unit cost* per siswa dan satuan biaya pendidikan di sekolah SMP Cipta Dharma Denpasar tahun pelajaran 2012/2013 sebesar Rp Rp 9.151.410,066, dan (4) kalau dilihat dari segi perubahan penggunaan dana dalam satu tahun yaitu penggunaan dana tahun 2010/2011 sebesar Rp 1.594.400.000 meningkat pada tahun 2012/2013 menjadi Rp 1.788.700.000, tetapi ada penurunan tahun 2011/2013 yakni Rp 1.581.600.000. Ini berarti ada kenaikan sebesar Rp. 194.300.000 atau 12,186%. Kalau dibandingkan kenaikan biaya rata-rata per siswa sebesar Rp 4.109.278,351 untuk tahun 2010/2011 dan biaya rata-rata per siswa tahun 2012/2013 Rp. 4.719.525,066 atau naik 14,850%. Dari kenaikan biaya rata-rata per siswa 14,850% ini tampak dengan jelas peningkatan mutu pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar dengan kualifikasi baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan sangat menentukan mutu pendidikan di SMP Cipta Dharma Denpasar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar dalam menetapkan kebijakan dalam merancang anggaran pendidikan ke depan dan landasan dalam memprediksi besarnya biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional sekolah secara efektif dan efisien berkaitan dengan mutu penyelenggaraan pendidikan swasta.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad S. Ruky. 2006. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ghozali, Abbas *et al*, 2004. *Studi Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Badan Penelitian Dan Pengembangan. Jakarta: Depdiknas

Komariah, Aan. 2006. *Pengantar Manajemen*. Bandung: UPI Press.

Mahon, Mc, M.W, *et al*. 2001. *Memperbaiki Keuangan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang, Depdiknas.

Rindjin, Ketut. 2007. *Biaya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Provinsi Bali Tahun 2005*. Singaraja: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Ganesha

Suprpto, J. 2007. *Statistik Untuk Berwawasan Global*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Triaswati, 2005. *Education Finance in Cambodia: Issues and Model, unpublished report for UNICEF*. Office at Cambodia.